

PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN CERAI YANG
DIAKIBATKAN ADANYA ORANG KETIGA
DITINJAU DARI PASAL 39
UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

SKRIPSI

OLEH

FADHLUN HUSAIN

NIM : 271 414 023

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk Di Uji

PEMBIMBING I

Mutia Cherawaty Thalib., SH., MHum
NIP: 19690704 199802 2 001

PEMBIMBING II

Dolot Alhasni Bakung., SH. MH
NIP :19850827 200912 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN CERAI YANG
DIAKIBATKAN ADANYA ORANG KETIGA
DITINJAU DARI PASAL 39
UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Oleh
Fadhlan Husain**

NIM : 271 414 023

**Telah Diuji Dan Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Hari/ Tanggal : Kamis , 05 Juli 2018
Pukul : 13.45 WITA**

Komisi Penguji :

1. **Dr. NUR M. KASIM S.Ag.,MH**
NIP: 19760208 200312 2 002

(.....)

2. **JULIUS T. MANDJO S.H., M.H.**

(.....)

3. **MUTIA CHERAWATY THALIB SH, M.Hum**
NIP: 19690704 199802 2 001

(.....)

4. **DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH, MH**
NIP: 19850827 200912 1 005

(.....)

Gorontalo, 05 Juli 2018

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo**

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa SH., M.Hum
NIP: 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

FADHLUN HUSAIN, NIM : 271 414 023, “ ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN CERAI YANG DIKIBATKAN ADANYA ORANG KETIGA DITINJAU DARI PASAL 39 UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 “, PEMBIMBING I MUTIA CHERAWATY THALIB., SH., M.Hum, PEMBIMBING II , DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH. MH.,

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat-akibat hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative di dukung data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa pembuktian perceraian diakibatkan adanya orang ketiga yakni dapat dibuktikan dengan pesan singkat ataupun foto dari pihak tergugat. Dengan cukup bukti yang ada, maka hakim akan menerima permohonan gugatan perceraian tersebut selama pembuktiannya jelas ketika dalam proses persidangan. Namun dalam hal ini, memang perceraian karena pihak ketiga tidak spesifikasi dijelaskan didalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan pertimbangannya terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengemukakan bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. sedangkan akibat hukum terhadap gugatan cerai yang diakibatkan adanya orang ketiga ditinjau dari Pasal 39 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa berdampak pada psikologi dan jiwa anak dikemudian hari. Diantara para pihak timbul hak dan kewajiban dimana sekalipun perkawinan putus, pihak suami wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah bagi pihak isteri selama masa iddah.

Kata Kunci : Perceraian, Pihak Ketiga

ABSTRACT

HUSAIN, FADHLUN. STUDENT ID:271 414 023. "LEGAL ANALYSIS ON DIVORCE LAWSUIT DUE TO ADULTERY UNDER THE ARTICLE 39 LAW NO 1 OF 1974". PRINCIPAL SUPERVISOR: MUTIA CHERAWATY THALIB., SH., M.Hum. CO-SUPERVISOR: DOLOT ALHASNI BAKUNG., SH.MH.,

The purpose of this research is to determine and to analyze the legal analysis on divorce lawsuit due to adultery under the article 39 law no 1 of 1974 concerning marriage, and its cause and effect.

This research is normative legal research supported by field research data. The result shows that proofs for divorce lawsuit due to adultery can be instant messages and photos of the defendant. The Judge will approve the divorce lawsuit only under the condition that there is enough evidence during the trial. A divorce lawsuit due to adultery is indeed not specified in Marriage Law, but there are some consideration is article 19 letter (f) Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the rules of the implementation of Law No. 1 of 1974 about Marriage which argues about the continuous dispute between husband and wife and there is no hope of living in harmony again in the household. While the legal consequences of divorce due to adultery under the Article 39 Law No 1 of 1974 concerning Marriage have impacts on the psychological aspects of children in the future. There are rights and obligations to each party, whereas even if the marriage breaks up, the husband is obliged to give *iddah* (waiting period) and *mut'ah* (consolation gift) for the wife during the *iddah* period.

Keywords: *Divorce, Adultery*

